PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAHASIA NASABAH BANK

Nanda Aulia Mardika^{a*}

nandamardika17@gmail.com

Daud Sofyan T Siahaan^{b**}

daudsofyand@gmail.com

Yarra Raja Seraf^{c***}

rajaseraf@gmail.com

Tiara Aulia Hardy^{d****}

tiaraauliahardy19@gmail.com

Farahdinny Siswajanthi^{e*****}

faradinny@unpak.ac.id

ABSTRACT

This research examines efforts to provide legal protection by banks for customer secrets with legal provisions based on Law Number 10 of 1998 concerning bank secrets and examines easy ways to prevent data leaks from bank customers. This research uses legal data, namely primary legal evidence and secondary legal evidence. This research focuses on library research, which means diving deeper into the applicable laws and regulations. Legal protection for customers as banking consumers is very important, considering that the positions of entrepreneurs and consumers, in this case banks and customers, are often unequal. So the regulation regarding efforts to protect bank secrets can be utilized as well as possible to continue to prevent data leaks from bank customers.

Keywords: Bank Secrets, Data, Customers.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang mengupayakan adanya perlindungan hukum dilakukan bank terhadap rahasia nasabah dengan ketentuan-ketentuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang rahasia bank dan mengkaji cara mudah mencegah kebocoran data dari nasabah bank. penelitian ini menggunakan data hukum yaitu evidensi hukum primer dan evidensi hukum sekunder. Penelitian ini fokus pada penelitian kepustakaan yang artinya menyelami lebih dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai konsumen perbankan sangatlah penting, mengingat kedudukan pengusaha dan konsumen dalam hal ini bank dan nasabah seringkali timpang. Maka diaturnya peraturan tentang upaya perlindungan terhadap rahasia bank ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk terus mencegah adanya kebocoran data dari nasabah bank.

Kata Kunci: Rahasia Bank, Data, Nasabah.

1. PENDAHULUAN

Dalam mengembangkan perekonomian Indonesia sebagai negara berkembang, peranan hukum adalah melindungi, mengatur, dan merencanakan kehidupan perekonomian agar dorongan kegiatan perekonomian diarahkan pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Undang-undang ini mempengaruhi kehidupan perekonomian dengan menetapkan aturan-aturan terhadap perbuatan-perbuatan yang tergolong perbuatan ekonomi.

Dalam dunia modern saat ini, perbankan berdampak besar atas pembangunan ekonomi dalam sebuah negara, dan berhubungan hampir dengan semua bagian yang berkaitan dengan berbagai usaha maupun kegiatan ekonomi lainnya senantiasa memerlukan jasa perbankan. Sederhananya, bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai misi menghimpun dana dari masyarakat, mengembalikan dana kepada warga masyarakat, dan menyelenggarakan jasa perbankan lainnya. Perkembangan perekonomian juga memerlukan perlindungan hukum khususnya bagi nasabah bank mengenai kerahasiaan nasabah. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Secara terminologis, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai gabungan dari dua pengertian, yaitu 'perlindungan' dan 'hak'. Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan perlindungan merupakan sesuatu atau perbuatan melindungi.

Oleh karena itu, hukum dapat dipahami sebagai kaidah atau praktek yang mengikat secara formal yang ditetapkan oleh suatu otoritas atau instansi pemerintahan yang berwenang. Dalam pengertian ini, perlindungan hukum merujuk pada upaya melindungi negara dan kekuasaan melalui berbagai kaidah yang telah berlaku. Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan fungsi hukum atau kaidah yang berfungsi

memberikan perlindungan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Bank merupakan suatu lembaga/perusahaan yang kegiatannya menghimpun, mengumpulkan, mengolah dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan simpanan lainnya dari pihak yang mempunyai kelebihan dalam dana (surplus unit kerja) dan menyalurkannya kepada masyarakat. Kebutuhan pinjaman atau pembiayaan lainnya (*deficit shopping unit*) untuk meningkatkan taraf hidup banyak orang.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (“UU 10/1998”), ketentuan berikut digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengguna (nasabah) jasa perbankan adalah sebagai berikut terjadi:

a. Memberikan Informasi Mengenai Kemungkinan Risiko Kerugian.

Pada Pasal 29 (4) UU 10/1998 menjelaskan bahwa demi kwpwntingan konsumen bank, bank wajib melaporkan potensi adanya kerugian sehubungan dengan transaksi antara nasabah dengan bank. Selain itu, akses informasi terkait status transaksi konsumen bank akan semakin terbuka dan bank juga akan menjamin transparansi di departemen.

b. Rahasia Bank

¹ JDIH Kab. Sukoharjo, “Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya”, (2024), Diakses pada 19 Maret 2024 dari <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya#:~:text=Perlindungan%20hukum%20adalah%20upaya%20melindungi,orang%20berhak%20memperoleh%20perlindungan%20hukum.>

Pada Pasal 1 angka 28 UU 10/1998 dinyatakan bahwa rahasia bank merupakan segala sesuatu yang mempunyai hubungan dengan keterangan terkait nasabah penyimpan dana dan simpanannya. Kemudian, Pasal 40 (1) dan (2) UU 10/1998 mengatakan, bahwa:

- 1) Suatu bank tidak boleh membocorkan keterangan dari nasabah, bank wajib merahasiakannya terkait nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali yang tertera dalam Pasal 41 hingga Pasal 44A.
- 2) Ketentuan di atas juga berlaku bagi pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut buku "Hukum Perbankan Indonesia" karya Muhammad Jumana, masyarakat mempercayai bank karena kerahasiaan seluruh data masyarakat terkait bank terjamin. Kemudian simpan uang Anda di bank atau gunakan layanan perbankan. Kepercayaan masyarakat tercipta ketika bank menjamin bahwa keterangan yang diketahui tentang dana simpanan nasabah dan status keuangannya tidak akan dilakukan hal yang menyimpang. Pasal 41 UU 10/10/1998, Pasal 41A UU Oktober 1998, Pasal 42 UU Oktober 1998, Pasal 43 UU 10/1992 tentang Bank dan Pasal 44A UU 10 Tahun 1998. Terdapat beberapa pengecualian terhadap pengungkapan rahasia bank berdasarkan UU 10/1998 bahwa untuk kepentingan pajak, penyelesaian tagihan bank yang diberikan kepada Badan Piutang dan Lelang Negara/Komisi Negara Urusan Piutang (BUPLN/PUPN), tujuan adanya suatu Peradilan dalam aspek Pidana, Perdata anatar bank dan nasabahnya adalah untuk pertukaran informasi antara bank atas permintaan tertulis, wewenang penyimpan dan dalam hal penyimpan jika meninggal dunia.

c. Mengamankan dana simpanan nasabah melalui lembaga penjamin simpanan

Pembentukan skema penjaminan simpanan seperti dimaksud pada Pasal 37B

(1) dan (2) UU 10/1998:

- 1) Semua bank wajib dapat dipercaya untuk menyimpan dana masyarakat pada bank tersebut.
- 2) Fasilitas perlindungan simpanan dibangun untuk menjamin simpanan masyarakat di bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Lembaga Penjamin Simpanan adalah entitas yang menjamin simpanan para penyimpan melalui sistem seperti asuransi dan dana penyangga. Oleh karena itu, undang-undang pada bulan Oktober 1998 mewajibkan pendirian LPS dan mengharuskan bank tersebut dipercaya oleh masyarakat untuk menyimpan dananya di lembaga tersebut. LPS ini diatur dalam UU 24/2004 tentang Perusahaan Penjamin Simpanan yang mana telah berubah dengan keputusan, menggantikan UU 3/2008 tentang perubahan atas UU 24/2004 tentang Perusahaan Penjamin Simpanan, sebagai hukum. UU Nomor 1 menjadi UU Nomor 7 Tahun 2009. Selain UU 10/1998, upaya pihak pemerintah dalam menjamin perlindungan knsumen juga turut diperhitungkan. Secara luas juga diatur dalam UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.²

Disahkannya UU Agustus 1999 mempunyai implikasi logis terhadap pelayanan perbankan. Oleh karena itu, pelaku usaha jasa perbankan hendaknya:

a. Menjalankan kegiatan usaha dengan integritas.

² Ismail. Kautsar, Dkk. 2022, "Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital di Indonesia yang Berkepastian Hukum", Diakses pada 19 Maret 2024 dari https://www.dokumjdih.jatimprov.go.id/upload/46799/Artikel_Bank_Digital_Kautsar_Ismail.pdf.

- b. Memberikan keterangan yang spesifik, jelas dan jujur tentang syarat dan informasi tentang jaminan layanan.
- c. Memperlakukan konsumen dengan adil dan jujur, memberikan pelayanan, dan tidak membeda-bedakan.
- d. Memastikan kegiatan perbankan sesuai dengan kebijakan standar perbankan yang berlaku.
- e. dst.

Pada UU 8/1999 dapat melindungi konsumen perbankan dengan memfasilitasi batasan kepada klausula baku yang telah bank tetapkan dengan mencantumkan Pasal 18 dalam peraturan tersebut.³

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan hukum normatif yang terfokus kepada ilmu hukum dan memanfaatkan data berdasarkan aspek hukum. Sebab penulis mengkaji adanya upaya perlindungan hukum terhadap rahasia nasabah dengan ketentuan-ketentuan hukum berdasarkan UU 10/1998 tentang rahasiaa bank dan mengkaji cara mudah mencegah kebocoran data dari nasabah bank. Peraturan perundang-undangan yang merupakan dokumen hukum primer dan artikel online yang merupakan dokumen hukum sekunder dijadikan sebagai sumber penelitian ini.

³ Jam'an. Abi Kurnia, S.H. 2018, "Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Bank Kepada Nasabah", Diakses pada 19 Maret 2024 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perlindungan-hukum-oleh-bank-kepada-nasabah-lt57a4a938b313e>.

3. PEMBAHASAN

a. Upaya Perlindungan Hukum Oleh Bank Terhadap Rahasia Nasabah

Kepastian hukum merupakan dambaan dan dambaan setiap orang, terutama bagaimana hukum berlaku dan diterapkan dalam situasi tertentu. Nasabah yang menyimpan Toko-toko bank jua wajib diberi jaminan halal dari kegiatan yang merugikan bank mereka. Selain itu, pengendalian yang tidak biasa dilakukan oleh bank penolakan mengungkapkan informasi tentang simpanan dan tabungan bank mengungkapkan informasi tentang simpanan dan tabungan nasabahnya kepada orang lain, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditentukan oleh Konstitusi.

Berdasarkan Pasal 14 Angka 1 UU Perubahan Pasal 1 Angka 28 UU Perbankan April 2023, rahasia bank yaitu segala keterangan yang berkaitan dengan keterangan tentang nasabah penyimpanan dan simpanannya. Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa perbankan. Sedangkan nasabah simpanan adalah nasabah yang menginvestasikan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan kontrak antara bank dengan masing-masing nasabah. Ini pada dasarnya adalah informasi tentang nasabah simpanan dan rahasia perbankan tabungannya. Yang jelas, bank berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah diatur dalam pasal 38 UU 14 Tahun 2023 amandemen pasal 40A(1) UU Perbankan, namun ada batasan mengenai apa saja yang harus dirahasiakan.

Apa bila nasabah bank merupakan Nasabah simpanan juga merupakan nasabah debitur, sehingga bank mempunyai kewajiban untuk melindungi informasi rahasia mengenai dirinya dalam kapasitasnya sebagai nasabah simpanan. Namun Pasal 2 Ayat 2 PBI 2/2000 menyatakan bahwa data nasabah wajib dirahasiakan

hanyalah data nasabah tabungan dan simpanannya, sedangkan informasi nasabah dan nasabah tabungan wajib dijaga kerahasiaannya tunduk pada kewajiban. Data milik bank diperlakukan rahasia.

Oleh karena itu, barangsiapa dengan sengaja memaksa bank, melakukan atau perusahaan afiliasinya untuk mengungkapkan keterangan yang mana dimaksud dalam Pasal 40 tanpa izin atau kewenangan OJK, dapat dipidanakan dengan pidana penjara paling sedikit dua kali dan paling banyak empat kali. Dendanya paling rendah 10 M dan paling banyak 200 M. Kemudian, direktur atau orang yang disamakan dengan itu, direktur atau orang yang disamakan dengan itu, pegawai bank, atau orang lain yang memiliki koneksi dengan pihak lain yang dengan sengaja membocorkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 di sanksi pidana penjara seumur hidup. Denda paling rendah 4 M dan paling banyak 8 M satu kali dalam waktu 2 tahun, sampai dengan 4 tahun. Selanjutnya, perusahaan yang menyalahgunakan privasi data pribadi dan tidak memiliki dasar pengolahan data pribadi dapat dikenakan sanksi administratif berupa, termasuk persetujuan subjek data data pribadi, setelah ditinjau berdasarkan UU PDP Perusahaan yang menyalahgunakan data pribadi dan tidak mempunyai hak untuk pengolahan data pribadi tersebut (termasuk persetujuan subjek data atas data pribadi tersebut) dapat dikenakan sanksi administratif dengan cara sebagai berikut:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Penghentian sementara dari setiap proses kegiatan data pribadi;
- 3) Penghilangan atau penghapusan data pribadi dan/atau;

4) Adanya denda administratif.⁴

Kejahatan pelanggaran data di Indonesia bukanlah kejadian baru. Yang paling rentan terhadap hal ini adalah kasus pelanggaran data di industri seperti lembaga jasa keuangan dan bank. Budi Aryeh Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), mengatakan beberapa bank dikenakan denda karena mengungkapkan dan menjual data nasabah. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aryeh Setiadi mengatakan kejahatan tersebut tidak terorganisir dan menolak menyebutkan nama bank tersebut. Karena tindakan dalam kasus ini bermotif ekonomi, maka sanksinya juga harus ekonomis. Denda yang dikenakan akan merupakan kelipatan dari keuntungan yang dikumpulkan untuk memberikan efek jera seiring dengan semakin tingginya denda.

Sementara itu, Kepala Direktorat Penyidikan dan Pengawasan (Karowasidyk) Baleskrim Poli dan Brigjen Ivan Kurniawan mengatakan, jika tindak pidana kebocoran data ada unsur pidananya maka akan diproses secara hukum. Lebih lanjut, Direktur Pelaksana PEPK OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pelanggaran data yang terjadi di industri keuangan, termasuk perbankan, juga dapat dilaporkan ke OJK dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.⁵

b. Cara Mencegah Kebocoran Data Nasabah Bank

Kebocoran informasi klien adalah salah satu bahaya yang dapat terjadi dalam industri perbankan. biasanya tentu merepotkan nasabah dan bank. Nasabah

⁴ Ayu. Herdian, & Darminto Hartono, (2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 1 No. 3, hlm. 294, Diakses pada 19 Maret 2024 dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6164>.

⁵ Dwi. Dian Jayanti, S.H. 2023, "Bolehkah Bank Memberikan Informasi Data Nasabah kepada Asuransi?", Diakses pada 19 Maret 2024 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-bank-memberikan-informasi-data-nasabah-kepada-asuransi-lt5d07ca5892d8f/>.

menderita kerugian ketika data rahasia disalahgunakan, dan bank juga menderita kerugian ketika masyarakat meragukan keandalannya. Ada berbagai cara untuk mencegah akibat kehilangan informasi nasabah bank.⁶ Tetapi cara-cara tersebut memerlukan kerjasama intens antara bank dan nasabah. Diantaranya adalah:

1) Mencegah Phishing

Phishing adalah jenis pengelabuan yang dirancang untuk memperoleh informasi klien secara ilegal. Phishing biasanya terjadi melangkaui panggilan telepon (voice phishing), situs web palsu, atau pengiriman email ke pelanggan. Seperti yang sering terjadi, masih banyak nasabah bank yang menjadi korban phishing. Mencegah phishing memerlukan kerja sama aktif dari bank dan nasabah. Bank dapat mengedukasi nasabahnya dan semua transaksi hanya diproses melalui nomor dan website resmi. Sebaliknya, jika ditemukan kejadian phishing, nasabah dapat segera melaporkannya ke banknya dengan memberikan nomor atau website yang digunakan peretas untuk melakukan penipuan tersebut.

2) Meminimalkan Risiko Spyware.

Eksepsi phishing, data pelanggan juga dapat diambil melalui spyware. Spyware adalah program yang menyelip ke dalam sistem komputer Anda tanpa terdeteksi Anda. Spyware biasanya memasuki komputer Korban melalui virus melalui Internet bisa melalui transmisi data. Cara ini dapat digunakan untuk memperoleh informasi klien bank, jikalau nasabah sering

⁶ Roma. Tiurlan Artha Saragih, 2013, "Rahasia Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Nasabah Menurut Ketentuan Hukum Perbankan". Diakses pada 19 Maret 2024 dari <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/4644>.

bertransaksi di Internet. Untuk mencegah komputer terinfeksi spyware, pelanggan dapat menginstal program antivirus. Pastikan juga menggunakan program antivirus yang benar-benar aman. Pelanggan juga harus berhati-hati saat melakukan transaksi melalui Internet. Jangan masuk ke situs web jika Anda tidak perlu. Bank dapat meminimalkan penyebab ini dengan memblokir situs web yang dapat membahayakan nasabahnya atau situs web palsu.

3) Meningkatkan Kenyamanan Bertransaksi.

Kesenjangan dalam proses transaksi dapat menimbulkan risiko kebocoran data nasabah. Salah satunya adalah dengan menggunakan perangkat EDC (Electric Data Capture) untuk melakukan transaksi. Metode transaksi ini tidak merepotkan dan nyaman, sehingga populer di kalangan banyak pelanggan. Namun, transaksi EDC nampaknya mengandung celah untuk aktivitas kriminal. Data kartu pelanggan dapat dikumpulkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan digunakan untuk tujuan yang merugikan pelanggan. Untuk mencegah hal tersebut, nasabah dapat menolak penggantian kartu oleh staf berkali-kali. Penukaran mata uang juga dapat dilakukan di mesin pembayaran. Pasalnya, jika data kartu dipertukarkan berkali-kali, maka bisa tersimpan di komputer pelaku. Mesin checkout magnetik juga dapat mengimpor data pelanggan dan mengumpulkannya dalam database khusus.

4) Meningkatkan Sistem Keamanan Bank.

Bank harus mengupgrade keamanan dengan memastikan bahwa perangkat keamanan yang dipakai untuk mematuhi kualifikasi standar internasional terbaru (misalnya

ISO 27001) dan diperbarui secara berkala. Anda dapat meningkatkan sistem Anda (yang dibuktikan dengan audit dari lembaga sertifikasi tersebut seperti SGS dan BI). Bank juga dapat mulai beralih ke teknologi cloud untuk menyimpan data nasabah. Teknologi cloud ini jauh lebih aman dibandingkan penyimpanan tradisional karena risiko kehilangan dan infeksi virus jauh lebih rendah. Menyimpan data pelanggan di cloud lebih murah dan efisien.⁷

c. Kasus Bank Yang Membocorkan Data Nasabah

Terkait rahasia bank, tidak sedikit kasus tentang membocorkan data nasabah oleh bank, banyak bank yang tidak mengakui bahwa telah melanggar peraturan perundang-undangan tetapi ternyata banyak nasabah yang data nya telah bocor, bocor kepada pihak perusahaan atau pihak lainnya, peneliti akan memberikan satu contoh kasus singkat terkait bank yang membocorkan data nasabah kepada pihak perusahaan.

Salah satu contoh kasus yang dapat peneliti ambil adalah kasus tentang seseorang yang bernama AP yang bekerja di sebuah perusahaan, di kasus ini pihak perusahaan tempat AP bekerja melakukan tangkapan layar rekening AP tanpa izin dari AP, dengan demikian AP merasa dirugikan karena kerahasiaan transaksi miliknya telah bocor. Pada saat AP rapat dengan pihak perusahaan, AP mempertanyakan kepada ketua Audit darimana bukti 9 lembar tangkapan layar transaksi bank nya didapat? Ketua Audit Perusahaan menyampaikan dari

⁷ Lintasarta, Cara Mencegah Kebocoran Data Nasabah Bank, (2019), Diakses pada 19 Maret 2024 dari <https://www.lintasarta.net/blog/article/cara-mencegah-kebocoran-data-nasabah-bank/>.

atasannya, tangkapan layar milik AP yang dijadikan bahan Audit berupa gambar transaksi rekening AP dari sebuah komputer.

AP melakukan somasi terhadap pihak bank dan pihak bank hanya menanggapi bahwa tidak ada pegawai bank yang melakukan tangkapan layar tersebut. Atas apa yang telah menimpa AP, pihak perusahaan terbukti dalam melakukan Audit telah melanggar peraturan perbankan dan pihak bank juga telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu UU 10/1998 tentang Perbankan. Dalam Pasal 1 angka 28 UU 10/1998 dijelaskan bahwa, “Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya.”

Pada Pasal 31 ayat (1) Peraturan OJK No. 1/POJK/07/2012 tentang PKSJK, dinyatakan “Pelaku usaha jasa keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga.” Pada Pasal 33 ayat (1) Peraturan BI No. 22/20/PBI/2020 tentang PKBI, dinyatakan “Penyelenggaraan jelas diatur dan ada sanksi bahwa penyelenggaraan dalam pengawasan Bank Indonesia dilarang memberikan data dan/atau informasi konsumen kepada pihak lain.”

Audit internal terhadap rekening AP harus mengajukan permohonan tertulis kepada pimpinan Bank Indonesia untuk memastikan bahwa proses audit yang dilakukan tidak terbukti melanggar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Peraturan No. 1/POJK/07/2012 tentang PKSJK dan Peraturan No. 22/20/PBI/2020 tentang PBI. Dengan sengaja memberikan tangkapan layar foto akun AP, ancaman hukumannya minimal dua tahun dan maksimal empat tahun

penjara, serta denda paling sedikit 4 miliar hingga 8 miliar dan sanksi administratif terhadap pihak bank.⁸

4. PENUTUP

Dari penelitian di atas yang diberi judul “Perlindungan Hukum Bagi Rahasia Nasabah Bank” tersimpulkan bahwa bank wajib melindungi setiap konsumen bank sesuai dengan peraturan yang ada. terkhusus terkait data pribadi Nasabah. Namun nyatanya praktik sehari-hari tidak membuat nasabah merasa terlindungi, namun justru membuat nasabah lebih berhati-hati dalam melindungi data pribadinya, dalam hal ini lebih pintar dalam mentransfer data dan informasi pribadi. Sementara itu, menurut nasabah, penerapan bank tersebut dinilai masih kurang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Nasabah dapat menggunakan sejumlah peraturan perundang-undangan untuk mendapat perlindungan dari bank, seperti UU perbankan 10/1998, UU Perlindungan Konsumen 8/1999, UU Otoritas Jasa Keuangan 21/2011, dan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Selain itu nasabah dapat menyampaikan pengaduan konsumen kepada bank sesuai dengan SEOJK.

Karena adanya beberapa permasalahan di sektor perbankan, sebaiknya pemerintah Indonesia mengadopsi UU perlindungan data identitas pribadi agar setiap permasalahan identitas data pribadi nasabah dapat diselesaikan secara adil. Bank wajib memberikan ganti rugi kepada nasabah, meskipun besarnya ganti rugi tidak sebesar kerugian yang dialami nasabah. Dengan demikian, bank menunjukkan tanggung jawabnya kepada nasabah, karena nasabah mengalami kerugian saat berbisnis dan

⁸ Binamulia Hukum, “Data Nasabah Dibocorkan Oleh Oknum Pegawai Bank”, tersedia di: <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/300>, diakses pada 16 Juni 2024.

diharapkan masyarakat agar lebih berhati-hati dan kritis dalam menyikapi segala hal yang diperlukan untuk melindungi hak-haknya dalam hubungannya dengan bank.

OJK menyatakan akan membuat langkah tegas dalam menjaga perlindungan data nasabah dalam menyimpan dan simpanannya. OJK akan membuat setiap aplikasi yang ingin memiliki akses ke data pribadi nasabah harus meminta izin dari pemilik data nasabah tersebut. Nasabah dengan memberikan izin akses nya merupakan salah satu syarat penggunaan aplikasi tersebut. OJK pun menegaskan jika data nasabah digunakan untuk pemasaran, OJK akan memberikan teguran keras pada pihak bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Herdian, & Darminto Hartono. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1 (3), 294. Diakses pada 19 Maret 2024 dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6164>.
- Binamulia Hukum, “Data Nasabah Dibocorkan Oleh Oknum Pegawai Bank”, tersedia di: <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/300>, diakses pada 16 Juni 2024.
- Dwi, Dian Jayanti, S.H. 2023. Bolehkah Bank Memberikan Informasi Data Nasabah kepada Asuransi?. Diakses pada 19 Maret 2024 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-bank-memberikan-informasi-data-nasabah-kepada-asuransi-lt5d07ca5892d8f/>.
- Ismail, Kautsar, Dkk. 2022. Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital di Indonesia yang Berkepastian Hukum. Diakses pada 19 Maret 2024 dari https://www.dokumjdih.jatimprov.go.id/upload/46799/Artikel_Bank_Digital_Kautsar_Ismail.pdf.
- Jam'an, Abi Kurnia, S.H. 2018. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Bank Kepada Nasabah. Diakses pada 19 Maret 2024 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perlindungan-hukum-oleh-bank-kepada-nasabah-lt57a4a938b313e>.
- JDIH Kab Sukoharjo. Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya. (2024). Diakses pada 19 Maret 2024 dari <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukumdancaramemperolehnya#:~:text=Perlindungan%20hukum%20adalah>

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

%20upaya%20melindungi,orang%20berhak%20memperoleh%20perlindungan%20hukum.

Lintasarta. Cara Mencegah Kebocoran Data Nasabah Bank. (2019). Diakses pada 19 Maret 2024 dari <https://www.lintasarta.net/blog/article/cara-mencegah-kebocoran-data-nasabah-bank/>.

Roma, Tiurlan Artha Saragih. 2013. Rahasia Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Nasabah Menurut Ketentuan Hukum Perbankan. Diakses pada 19 Maret 2024 dari <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/4644>.